

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Konflik dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Tidak ada masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik. Diantara konflik yang terjadi itu juga meliputi konflik perkebunan yakni pertentangan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di sekitar areal perkebunan perusahaan tersebut. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menjelaskan sampai pada pertengahan 2016 sudah tercatat adanya 690 kasus konflik perkebunan, dengan rincian 494 kasus lahan, 37 kasus kehutanan, 159 kasus nonlahan yang dihimpun dari 31 provinsi. (Direktorat Jendral Perkebunan, 2016)

Mua'adi (2010), menyebutkan bahwa mayoritas konflik perkebunan di Indonesia disebabkan adanya kesenjangan sosial ekonomi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar. Sementara itu menurut Yunus (2013), banyak konflik yang terjadi disebabkan oleh masalah lingkungan, tumpang tindih lahan, sengketa wilayah, dan sebagian besar merupakan masalah kesepakatan perusahaan yang tidak dipenuhi masyarakat serta sengketa tanah publik oleh perusahaan swasta. Terutama juga meliputi konflik kepemilikan lahan untuk pertanian, konflik pertanian terjadi akibat adanya tuntutan hukum timbal balik antara masyarakat dengan perusahaan atas kepemilikan hutan. (Mutolib dkk, 2015)

Luas daerah perkebunan di Indonesia, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari seluruh komoditas utama perkebunan seperti karet, kopi, teh, kelapa, kakao, tebu dan kelapa sawit. Komoditas karet dan kelapa sawit merupakan areal perkebunan yang terluas. Perkembangan perkebunan sawit di Indonesia meningkat sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir, luasnya meningkat rata-rata 14% per tahun. (Susila, 1998). Bahkan Indonesia mampu mengejar negara Malaysia yang sebelumnya menduduki peringkat pertama dalam urusan minyak sawit. Melihat data terbaru (BPS 2009) bahwa Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksi tahun 2009 sebesar 20,9 juta ton minyak sawit. (BPS Statistik Kelapa Sawit, 2009)

Pada tahun 1986, luas perkebunan kelapa sawit baru mencapai sekitar 606.800 ha, tetapi pada tahun 1997 meningkat pesat menjadi 2,25 juta ha. Dan saat ini pusat dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia terletak di provinsi Sumatera Utara (905.000 ha), provinsi Riau (544.700 ha), provinsi Kalimantan Barat (211.400 ha) dan provinsi Sumatera Selatan (206.000 ha). Pada masa yg akan datang dikembangkan secara cepat di Kalimantan Timur, Sulawesi dan Irian Jaya. (Susila 1998). Kelapa sawit ini merupakan salah satu komoditas perkebunan yang cukup banyak memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara. Prospek dari kelapa sawit Indonesia yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat yang menguntungkan dalam pembangunan ekonomi nasional, pembangunan wilayah

dan solusi pemecahan masalah penganguran, kemiskinan dan pembangunan daerah (Ditjen PPHP, 2011).



Inti-plasma merupakan pembagian lahan perkebunan sawit oleh inti yaitu perusahaan dan plasma yaitu masyarakat. Inti plasma ini jika diingat sejarahnya tidak terlepas dari upaya pemerintahan pada era 1970-an dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan yang kemudian menjadi kemitraan inti-plasma ini merupakan sebuah warisan dari zaman pemerintahan Bapak Soeharto di era 1970 dan 1980-an. Program ini dibuat bertujuan untuk membantu pengelolaan kebun petani melalui keterlibatan perusahaan sebagai penjamin kredit, pelaksana kegiatan dan pemasaran hasil kebun. Pasalnya petani pada saat itu dinilai tidak punya kemampuan teknis untuk mengelola kebun maupun mengolah hasil produksinya.

Di provinsi Sumatera Barat pun berlangsung pengembangan perkebunan kelapa sawit. Adapun luas areal perkebunan sawit yang ada di Sumatera Barat dewasa ini ada sekitar 390.380 ha dengan produktifitas 1.152.187 ton, yang banyak diproduksi di kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Agam, dan Sijunjung. Dan potensi pengembangan sawit untuk ketersediaan lahan di Sumatera Barat yaitu seluas 163.19 ha. Zuhendi (2015) sebagai kepala Dinas Tanaman Pangan Sumatera Barat menyatakan bahwa potensi luas lahan sawit di Sumatera Barat pada tahun 2013 yaitu 8.323 ha dan tahun 2014

seluas 24.373 ha. Jadi jumlah batang kelapa sawit yang akan menjadi limbah pada tahun 2013 adalah 3.329,2 ha dan pada tahun 2014 adalah sekitar 9.749,2 ha.

Pasaman barat merupakan salah satu kabupaten yang banyak memproduksi kelapa sawit di provinsi Sumatera Barat. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat seluruhnya 102.000 Ha, sekitar 21.000 Ha termasuk perkebunan inti dan plasma, 14.000 Ha perkebunan CV dan sisanya adalah perkebunan rakyat. Berikut ini tabel luas perkebunan sawit di seluruh kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.

**Tabel 1 Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat**

No	Kecamatan	Luas/Area (Ha)
1	Sungai Beremas	9.270
2	Ranah Batahan	9.685
3	Koto Balingka	11.658
4	Lembah Malintang	11.681
5	Sungai Aua	12.598
6	Gunung Tuleh	10.576
7	Pasaman	10.500
8	Sasak Ranah Pasisie	4.093
9	Luhak Nan Duo	6.279
10	Kinali	2.151

11	Talamau	3.411
<b>Jumlah</b>		101.902

*Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat 2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari luas 101.902 ha perkebunan sawit di Pasaman Barat, perkebunan sawit yang terluas di Pasaman Barat berada di Kabupaten Sungai Aua yakni seluas 12.598 hektar. Sementara Kecamatan Luhak Nan Duo memiliki luas yakni 6.279 hektar.

Dilihat dari luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Pasaman Barat, tentunya areal tersebut dikelola oleh perusahaan. Berikut nama-nama perusahaan yang ada di Pasaman Barat, yakni diantaranya PT Agrowiratama POM, PT Agrowiratama Estate, PT Usaha Sawit Mandiri, PT Agro Bisnis Sumber Makmur, PT Rimbo Panjang Sumber Makmur, PT Anam Koto, PT Gersindo Minang Plantation, PT Andalas Agro, PT Bakrie Plantation, PT Agro Industri, PT Pasaman Marama, PT Sari Buah Sawit, PT PHP Pasaman, PT AMP Plantation, PT Inkut Agritama, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Sumatera Pasaman Jaya, PT Usaha Sawit Mandiri, PT Agrowiraligatsa, PT Laras Intel Nusa, PT Sago Nauli Pasaman, dan yang lainnya. (info sawit.com)

Dari banyaknya daftar perusahaan yang mengelola perkebunan sawit di Pasaman Barat. Peneliti memilih PT PHP Pasaman (Permata Hijau Pasaman) beserta masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan sebagai objek yang

akan penulis teliti. Dikarenakan PT PHP telah mengalami konflik dengan masyarakat Nagari Kapa sejak tahun 1997 sampai saat sekarang ini. Banyak konflik yang muncul selama 24 tahun belakangan ini yang memicu ketegangan antara PT PHP dengan masyarakat di Nagari Kapa. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui bagaimana konflik itu terjadi diantara PT PHP dengan Masyarakat Nagari Kapa selama ini. PT PHP Pasaman ini terletak di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. PT PHP Pasaman tentunya juga tidak terlepas dari isu-isu konflik dengan masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan.

PT PHP (Permata Hijau Pasaman) merupakan salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo. PT PHP ini juga merupakan anak perusahaan dari Wilmar Group, yakni grup perusahaan agribisnis terdaftar terbesar menurut kapitalisasi pasar bursa efek. Wilmar merupakan perusahaan holding investasi yang menyediakan jasa manajemen lebih dari 400 anak perusahaannya. Adapun aktivitas dari Wilmar meliputi perkebunan kelapa swit, penyulingan minyak masakan, penggilingan biji minyak permerosesan dan pengepakan minyak masakan konsumsi, lemak, oleokimia, gamdum dan biodisel. Wilmar group telah memiliki lebih dari 450 pabrik dan jaringan distribusi diseluruh India, Indonesia, Cina dan 50 negara lainnya. Grup perusahaan ini mempunyai lebih dari 92.000 karyawan dari berbagai negara. (wikipedia) Berdasarkan SK HGU No.65/HGU/BPN/2004, PT PHP

memiliki luas perkebunan sekitar 1.600 hektar yang terletak di Nagari Luhak Nan Duo dan sebagian lahannya lagi masuk dalam administrasi Nagari Sasak Ranah Pesisir. Lahannya merupakan tanah gambut ditepi pantai barat Pasaman Barat, yang dikeringkan lalu ditanami sawit. (mongabay)

Persoalan mengenai konflik yang terjadi antara PT PHP dengan masyarakat di Nagari Kapa ini berawal pada tahun 1997, ketika pucuk adat dan niniak mamak di Nagari Kapa menyerahkan tanah ulayat nagari kepada Bupati Pasaman untuk dijadikan tanah negara, lalu selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada investor/perusahaan untuk dijadikan kegiatan perkebunan sawit dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) sebagai hak pengusahanya. Masyarakat merasa terkejut karena tanah ulayat nagari yang biasa digunakan masyarakat untuk menanam tumbuhan palawija ini tiba-tiba diserahkan kepada investor. Penyerahan itu ternyata tidak melalui permusyawaratan dengan masyarakat sehingga banyak diantara masyarakat yang menolak dan tidak setuju atas penyerahan lahan tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui mengenai proses penyerahan, berapa luas dan dimana titik lokasinya. Akhirnya banyak kalangan dari anak nagari merasa dirugikan karena merasa kehilangan tanah mereka. Termasuk dari kalangan bundo kanduang yang notabene sebagai pemilik ulayat. (mongabay)

Adapun salah satu isu penting ekspansi perkebunan kelapa sawit yang juga terjadi di Indonesia yakni terjadinya konflik eskalatif yang masif antara perusahaan perkebunan dengan komunitas yang terkena dampak. Konflik tersebut

sudah terjadi sejak era Orde Baru dan memuncaknya pada Era Reformasi. (Colchester et al. 2006; Afrizal dan Indrizal 2010; Liandra 2014; Widiani 2016) Sektor perkebunan tersebut selama empat tahun ini yakni dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018 telah menempati posisi tertinggi penyumbang konflik agraria dengan jumlah 83 kasus atau 60% dari semua sektor (Konsorsium Pembaruan Agraria 2018). Konflik perkebunan kelapa sawit yang banyak terjadi sudah berlanjut sampai pada tahun 2018 seperti yang dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (Konsorsium Pembaruan Agraria 2018).

### **B. Rumusan Masalah**

Konflik penguasaan lahan yang terjadi di Nagari Kapa ini sudah terjadi sejak tahun 1997. Ketika itu niniak mamak dan pucuk adat menyerahkan tanah ulayat kepada Bupati Pasaman pada saat itu untuk dijadikan tanah negara yang akan diberikan kepada investor untuk dijadikan hak guna usaha. Namun masyarakat menuntut karena tidak merasa dilibatkan oleh niniak mamak dan pucuk adat dalam mengambil keputusan. Masyarakat mengira penyerahan tersebut hanya untuk kepentingan beberapa pihak saja.

Namun demikian persoalan konflik di Nagari Kapa tentunya tidak sesederhana yang diceritakan diatas, seringkali konflik itu bersifat lebih kompleks. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan evaluasi empiris lebih mendalam tentang beberapa pertanyaan pokok, sebagai berikut :



1. Konflik apa saja yang terjadi terkait penguasaan lahan perkebunan sawit antara PT PHP dengan Masyarakat Kapa?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan masyarakat dan proses penyelesaian konflik penguasaan lahan perkebunan sawit antara PT PHP Pasaman dengan masyarakat?.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui konflik apa saja yang terjadi terkait penguasaan lahan perkebunan sawit antara PT PHP dengan Masyarakat Kapa.
2. Menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perlawanan masyarakat dan proses penyelesaian dari konflik penguasaan lahan perkebunan sawit antara PT PHP (Permata Hijau Pasaman) dengan Masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu antropologi, khususnya mengenai Konflik yang terjadi pada Masyarakat Inti Plasma.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, referensi dan bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
2. Manfaat Secara Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu antropologi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat minangkabau khususnya di Nagari Luhak Nan Duo, kecamatan Pasaman, kabupaten Pasaman Barat.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang konflik penguasaan lahan perkebunan sawit pada masyarakat di Nagari kapa ini bukan lah hal yang pertama kali diteliti, sudah banyak tentunya penelitian mengenai konflik lahan perkebunan sawit. Adapun beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang dapat menjadi peninjau terhadap penelitian yang penulis teliti.

Penelitian yang pertama dari Nessya Atillah (2015) yang berjudul Konflik Tanah Ulayat di Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat. Fokus utama dalam penelitiannya adalah konflik tanah ulayat antara PT Anam Koto dengan masyarakat nagari Aia Gadang. Adapun hasil dari penelitiannya yakni mengenai konflik tanah yang terjadi di nagari Aia Gadang adalah persinggungan antara hukum positif (hukum negara) dengan hukum yang dimiliki masyarakat (hukum adat). Hukum negara yang mendominasi menjadikan masyarakat hukum adat pemilik tanah ulayat merasa dirugikan dengan adanya UUPA No.5/1960 yang membatasi pengakuan hak ulayat atas masyarakat. Selain itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Anam Koto yang mendapat HGU dari penyerahan

tanah ulayat yang diperoleh dari niniak mamak nagari Aia Gadang dan Muaro Kiawai yang mangkir dari tanggung jawabnya untuk memberikan plasma bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah selaku mediator dalam konflik ini pun mengalami banyak kesulitan dalam menyelesaikan kasus ini.

Selanjutnya penelitian dari Zaiyardam Zubir dan Nurul Azizah Zayzda (2010) yang berjudul Peta Konflik Dan Konflik Kekerasan Di Minangkabau Sumatera Barat. Fokus utama dalam penelitiannya adalah Pemetaan Konflik Dan Kekerasan Di Sumatera Barat. Adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah Konflik yang terjadi di Minangkabau beragam bentuknya. Beberapa konflik yang banyak terjadi adalah konflik tanah, penguasaan sumber daya alam, perkelahian antarkeluarga, perkelahian antarkampung, dan perkelahian antarkelompok etnis. Dilihat dari semua konflik yang ada, konflik tanah inilah yang intensitasnya paling tinggi. Menyangkut pada masalah pembebasan tanah, pencaplokan tanah, batas kampung, dan pembagian harta pusaka. Inti akar dari persoalan konflik tanah/lahan ataupun konflik lainnya adalah terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat.

Penelitian yang ketiga dari Alan Darmawan (2020) yang berjudul Arena Sosial, Petani, dan Perluasan Konflik Pertahanan di Sumatera Utara. Fokus penelitiannya pada sengketa agraria di Sumatra Utara yang meluas ke daerah rawa, semakin kompleks, seiring dengan perkembangan ekonomi dan politik. Penelitian ini melihat bagaimana cara masyarakat menangani perampasan tanah, perubahan

tata guna lahan dan negosiasi pembatasan lahan dalam pemerataan pohon mangrove disekitarnya.

Penelitian yang ke empat oleh Minako Sakai (2002) yang berjudul Solusi Sengketa Tanah di Era Reformasi Politik dan Desentralisasi Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi dampak dari beberapa tahun awal reformasi politik, demokratisasi dan otonomi daerah terhadap masalah agraria. Fokus utama penelitian nya yakni tentang masalah agraria, posisi hak ulayat dan solusi dari sengketa tanah.

Yang terakhir hasil penelitian dari Didik Suharjito (2001) yang berjudul Proses Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan: Suatu Kajian Antropologi Hukum. Penelitian ini membahas tentang kasus sengketa lahan hutan antara perusahaan kehutanan swasta dengan masyarakat lokal. Fokus penelitian ini adalah pemilihan strategi yang diterapkan masarakat atau kelompok kepentingan. Ada dua strategi yakni opsi hukum (hukum adat, hukum negara dan surat perjanjian) dan opsi model resolusi konflik.

Dari beberapa skripsi dan jurnal diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis. Persamaan nya yaitu meneliti tentang konflik agraria. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian nya. Yang mana berfokus pada akar penyebab dari konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat, bentuk-bentuk dari konflik yang terjadi dan kemudian bagaimana

proses dari penyelesaian yang dilakukan perusahaan dan masyarakat. Dari persamaan dan perbedaan diatas yang kemudian akan membantu penulis agar dapat membangun pemahaman untuk melakukan penelitian dan merujuk beberapa tulisan untuk dijadikan pegangan dalam penelitian penulis kali ini.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Didalam kehidupannya masyarakat memiliki ukuran dalam bertingkah laku, yang mencakup tentang bagaimana tanggapan terhadap lingkungannya. Menurut Suparlan, di dalam suatu kebudayaan, wujud dari ukuran dalam hidup dan bertingkah laku bersumber dari pengetahuan. Ukuran ini melahirkan bermacam macam nilai, norma dan aturan yang akan muncul dan bersumber dari terwujudnya ide, gagasan dan tujuan manusia (Suparlan,1987:107)

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris yakni *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti kawan. Sedangkan masyarakat sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Seperti dikatakan oleh Koentjaraningrat bahwa masyarakat ini merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi.

### **1. Konflik**

Masyarakat didalam kehidupannya tentu tidak terlepas dari konflik. Konflik yang terjadi pada masyarakat biasanya disebabkan karena perbedaan kepentingan dan apa yang diinginkan. Seperti yang dikatakan oleh Dean

G.Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Kepentingan ini mengarah pada perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niat (Raven dan Rubin, 1983). (Dalam Teori Konflik Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin hal 21)

Terdapat banyak sekali konflik yang terjadi dikalangan masyarakat menyangkut tanah ataupun lahan perkebunan. Secara tradisional penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dan diselesaikan menurut adat masyarakat itu sendiri, tetapi ada juga yang sebagian penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui badan pengadilan. Hal ini karena pemahaman dari masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada tidaklah sama, ada yang menjadikan hukum adat dan hukum agama sebagai pedomannya. Hal ini disebut juga dengan pluralism hukum, atau kemajemukan hukum.

Menurut Griffiths (2006), Kemajemukan hukum (*legal pluralism*) merupakan sebuah situasi di mana terdapat dua maupun lebih sistem hukum yang berkerja secara bersamaan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama. Hooker (1975) mengatakan bahwa pluralism hukum ini penting

dikaji karena fakta dan potensinya untuk saling berkompetisi hingga menciptakan ketidakpastian.

Konsep pluralisme hukum tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan dari interaksi sistem-sistem hukum dalam suatumasyarakat, antara hukum negara (*state law*) dengan sistem hukum rakyat (*folklaw*) dan sistem hukum agama (*religious law*) kemudian menjadi tidak terbatas pada ketiga sistem hukum itu saja, tetapi selanjutnya diperluas termasuk juga system normative yang berupa mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri. Pada tahap perkembangan ini, konsep plurarisme hokum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hokum dalam masyarakat.

Menurut Fisher et all (2001) konflik dapat dikatakan sebagai suatu pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi yang disebabkan karena adanya berbagai macam perkembangan yang menimbulkan perbedaan pendapat, ide dan keyakinan.

Adapun tipe-tipe konflik menurut Fisher, antara lain:

a) Tanpa Konflik

Pada tipe ini masyarakat hidup secara damai tanpa adanya konflik. Jika masyarakat ingin hidup damai dan tentram seperti ini , maka masyarakat

harus hidup secara optimis dan dinamis. Masyarakat dapat memanfaatkan konflik dengan mengelola konflik secara kreatif.

b) Konflik Laten

Tipe konflik ini bersifat tersembunyi ataupun tidak terlihat. Perlu untuk diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif.

c) Konflik Terbuka

Tipe konflik ini memiliki akar yang dalam dan terlihat sangat nyata. Yang mana memerlukan berbagai macam tindakan untuk mengatasi konflik ini.

d) Konflik Permukaan

Tipe konflik ini memiliki akar yang dangkal. Biasanya konflik muncul disebabkan karena kesalahpahaman, dan dapat diatasi dengan memperbaiki komunikasi.

Didalam konflik antara PT PHP dengan masyarakat kapa sangat mungkin juga ditemukan variasi dari Tipe konflik sebagaimana dijelaskan Fisher diatas. Konflik yang terjadi pada Masyarakat kapa dengan PT PHP masuk kedalam tipe konflik Terbuka. Konfliknya sangat jelas terlihat dan sudah berlangsung sangat lama, dan sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Kategorisasi diatas juga akan menjadi panduan bagi penulis untuk menelusurinya di dalam penelitian ini.

## 2. Perlawanan Masyarakat

Konflik yang terjadi pada masyarakat menimbulkan berbagai macam perlawanan. Perlawanan ini biasa juga disebut dengan resistensi. Masyarakat



berupaya melakukan perlawanan biasanya untuk bertahan dan berusaha untuk memperjuangkan hak nya. Perlawanan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses, cara, perbuatan melawan ataupun usaha untuk mencegah, menentang guna mempertahankan dengan gigih. Menurut Tarrow (1994), jika telah muncul ketidakadilan dan rasa putus asa maka akan menimbulkan gerakan sosial (*social movement*) yang nantinya akan menimbulkan perubahan kondisi sosial.

Sedangkan menurut Scott (2000), perlawanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok untuk menolak ataupun menentang pihak lawan. Ada 2 bentuk perlawanan menurut Scott, pertama perlawanan atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tertutup (*hidden transcript*).

a. Perlawanan Terbuka menurut Scott memiliki ciri-ciri, yaitu:

- Organik, simpatik dan kooperatif
- Tidak mementingkan diri sendiri (berprinsip)
- Berkonsekuensi revolusioner
- Meniadakan basis dominasi

Perlawanan terbuka ini seperti melakukan bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, mogok makan dan lainnya.

b. Perlawanan Tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Perlawanan tidak teratur, terjadi secara individual

- Bersifat mementingkan diri sendiri
- Tidak berkonsekuensi revolusioner
- Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi

Contoh perlawanan tertutup ini seperti pencurian kecil, hujatan, makian dan pura-pura patuh juga termasuk dalam perlawanan tertutup ataupun perlawanan sembunyi.

### 3. Proses Penyelesaian Konflik

Setiap konflik atau pertentangan, pasti memerlukan alternatif tertentu untuk menyelesaikannya. Menurut Widjanto (2004), mengatakan bahwa terdapat 4 tahap penting dalam proses penyelesaian suatu konflik, antara lain :

- Upaya militer untuk mengendalikan dan menghentikan siklus kekerasan  
 Dalam tahap ini bagaimana kita dapat mengetahui apa tindakan atau aksi yang dapat meminimalisasi korban sekaligus menjadi prasyarat dalam proses penyelesaian konflik selanjutnya yang lebih mengedepankan pendekatan konflik.

- Penyelesaian politik (*political settlement*)

Dengan melakukan serangkaian upaya negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai.

- Solusi konflik secara komprehensif dengan menerapkan *problem solving approach*. Yakni dengan menerapkan alternatif pemecahan suatu masalah

dieksplorasi, memilih yang terbaik bagi kedua belah pihak dan selanjutnya diterapkan secara empirik.

- Tahap resolusi yang terakhir yakni peace-building meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahapan ini merupakan tahapan terberat serta memakan waktu yang sangat lama dikarenakan memiliki orientasi struktural dan kultural.

Akibat yang terpenting dari tahapan ini dapat memulihkan kepercayaan dan kohesi sosial dalam masyarakat sehingga integrasi dari masyarakat secara harmonis dapat dicapai. Melalui tahapan ini juga diharapkan konflik tidak hanya selesai secara tuntas. Tetapi juga tidak menyisakan potensi kerawanan dimasa yang akan datang.

Sementara itu, upaya untuk memecahkan konflik juga dapat di lihat berdasarkan cara yang di tempuh. Cara pemecahan konflik ini dapat di bagi ke dalam dua kategori besar yaitu Litigasi dan Non Litigasi.

#### 1. Litigasi

Pada prosesnya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu ditempuh melalui badan peradilan. Menurut Usman (2003:10), penyelesaian sengketa merupakan cerminan dari doktrin trias politica, di mana kekuasaan kehakiman diberdayakan dan diberdayakan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Sengketa yang melalui prosedur peradilan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara (*due to process*).

## 2. Non Litigasi

Prosedur penyelesaian sengketa, yang mekanismenya berlangsung di luar pengadilan, khususnya melalui perundingan, mediasi dan arbitrase.

### a) Negosiasi

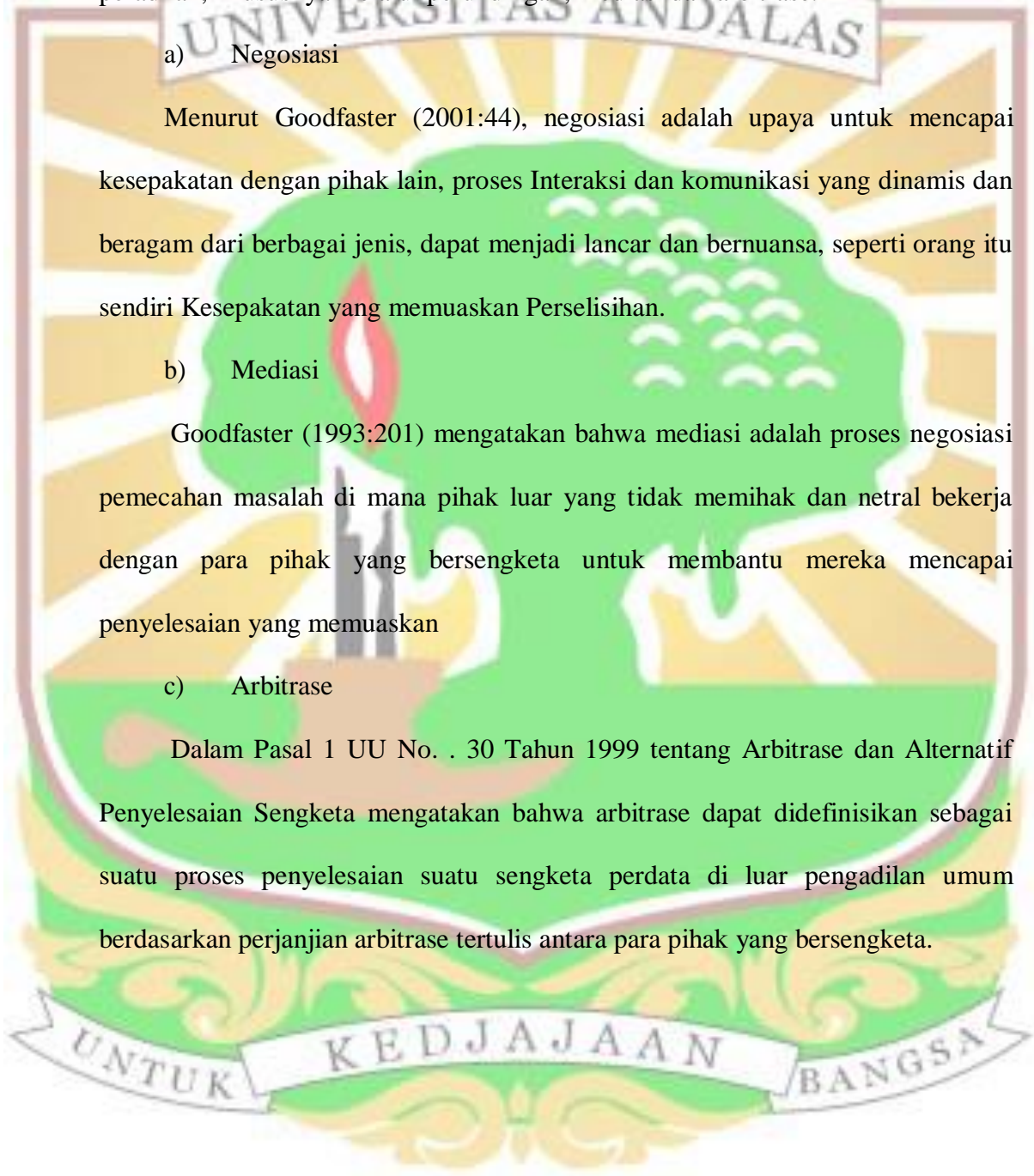
Menurut Goodfaster (2001:44), negosiasi adalah upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, proses Interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beragam dari berbagai jenis, dapat menjadi lancar dan bernuansa, seperti orang itu sendiri Kesepakatan yang memuaskan Perselisihan.

### b) Mediasi

Goodfaster (1993:201) mengatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai penyelesaian yang memuaskan

### c) Arbitrase

Dalam Pasal 1 UU No. . 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa arbitrase dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa.



## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif (penelitian kualitatif menurut Creswell (2015) adalah proses penelitian yang didasarkan pada pendekatan penelitian metodologis yang khas yang mengkaji masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Peneliti menciptakan gambaran holistik yang kompleks, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan rinci dari para partisipan dan melakukan penelitian. Dalam kajian Environment atau Natural Environment Creswell (1998) juga mengatakan bahwa fokus studi kasus ini adalah pada detail kasus dalam suatu peristiwa, baik itu individu, kelompok budaya atau potret kehidupan.

Pemilihan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui apa akar penyebab terjadinya konflik antara PT PHP Pasaman dengan masyarakat, bentuk-bentuk konflik dan proses penyelesaiannya yang terjadi di Nagari Kapa, kecamatan Luhak Nan Duo, kabupaten Pasaman Barat.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Kapa, kecamatan Luhak Nan Duo, kabupaten Pasaman Barat. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut karena daerah ini merupakan salah satu daerah di Pasaman Barat yang banyak terdapat

lahan perkebunan dan selama 24 tahun ini mengalami konflik yang kunjung belum selesai antara perusahaan dengan masyarakat.

### 3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah informan penelitian yang memahami informasi tentang topik penelitian. Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus (Nurdiani,2004). Teknik ini mengambil data melalui informan awal yang kemudian informan tersebut menunjukkan informan-informan berikutnya untuk diwawancarai.

Spradley (Moleong, 2004:165) mengatakan bahwa informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu:

- Informan yang sangat terlibat dalam suatu kegiatan atau bidang kegiatan yang menjadi objek atau perhatian penelitian, dan hal ini biasanya ditandai dengan kemampuan memberikan informasi tentang sesuatu yang ditanyakan di luar kepala
- Informan harus aktif dalam kegiatan lingkungan yang menjadi tujuan investigasi
- Informan harus memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk dimintai keterangan dan informasi.

- Informan memberikan informasi secara spontan, informan seringkali tidak diproses atau dikemas terlebih dahulu, dan masih relatif polos dalam memberikan informasi

Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan 12 informan yang dirasa memiliki pengetahuan mengenai konflik penguasaan lahan perkebunan sawit hingga nanti mengetahui konflik-konflik apa saja yang terjadi, bentuk-bentuk perlawanan masyarakat dan bagaimana proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, peneliti mengambil kesimpulan dengan menentukan informan sebagai berikut :

- Wali nagari/Mantan Wali nagari
- Niniak Mamak atau orang yang dituakan
- Masyarakat

Berikut ini tabel mengenai daftar nama-nama yang menjadi informan peneliti.

**Tabel 2. Daftar Informan**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	AG	48	Niniak Mamak (Suku Melayu)	Informan Kunci
2	AR	51	Niniak Mamak (Suku Tanjung)	Informan Kunci
3	UA	50	Niniak Mamak (Suku Koto)	Informan Kunci
4	SR	52	Mantan walinagari (Priode 2008-2014)	Informan Kunci
5	DM	50	Niniak Mamak (Suku tanjuang)	Informan Kunci

6	AD	45	Aparatur nagari	Informan Biasa
7	SR	54	Petani	Informan Biasa
8	RY	38	Petani	Informan Biasa
9	NR	40	Petani	Informan Biasa
10	MN	45	Petani	Informan Biasa
11	RB	58	Petani	Informan Biasa
12	MK	40	Petani	Informan Biasa

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini ada dua teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder: Data primer dikumpulkan langsung dari peneliti di lapangan atau informan. Data sekunder adalah data siap pakai yang sudah ada dan berupa dokumen resmi seperti: data penduduk, gambaran umum tempat, dan lain-lain. (Suryabrata, 2004: 39)

Data Sekunder berupa bukti-bukti, catatan-catatan sejarah atau laporan-laporan yang disimpan dalam arsip-arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan (data dokumentasi) dikumpulkan. Penggunaan data sekunder dilakukan oleh peneliti untuk mencari tahu apa akar penyebab konflik, bentuk-bentuk konflik dan bagaimana proses penyelesaian konflik antara masyarakat Nagari Kapa dengan PT PHP. Dalam penelitian ini, ada 4 teknik penelitian yang akan digunakan yaitu diantaranya:



### **a. Observasi Partisipatif**

Observasi atau mengamati, menurut Angrosino (dalam Creswell, 2015: 232), berarti mengamati fenomena di lapangan melalui panca indera peneliti, seringkali dengan instrumen atau perangkat, dan mendaftarkan suatu objek untuk tujuan ilmiah dengan maksud merasakan pengetahuan tentang suatu fenomena. Dan kemudian memahami, berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Dengan mengamati peneliti dapat memahami apa akar penyebab konflik, bentuk-bentuk konflik dan bagaimana proses penyelesaian konflik anatar PT PHP dengan Masyarakat Nagari Kapa.

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian, melalui tanya jawab dalam percakapan tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2010). 2006: 72. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat dan sikap mereka, yang merupakan pembantu terpenting dari metode observasi (Koentjaraningrat, 1997: 129)

### **c. Studi Keputakaan**

Teknik pengumpulan data didasarkan pada studi literatur mengenai konflik penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di masyarakat Nagari Kapa, Luhak Nan Duo, Kecamatan Pasaman Barat sebagai bahan tambahan untuk penulisan skripsi ini, penulis mencari data dari dokumen ilmiah dan resmi pemerintah pusat.

### **d. Dokumentasi**

Pada saat penelitian, peneliti menggunakan perekam suara, video dan foto. Perekam suara ini digunakan untuk merekam suara informan saat sesi wawancara. Video dan foto digunakan untuk mengabadikan gambar dan video kegiatan yang ada di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu tahapan proses penelitian yang bertujuan untuk mempelajari, mentransformasikan dan menemukan pola fenomena sosial sehingga laporan penelitian dapat memberikan informasi, kesimpulan dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang harus dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, menyeleksi menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, kemudian mencari dan menemukan pola, kemudian menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari serta memutuskan, apa penting untuk itu, katamu kepada orang lain.

Analisis data ini juga merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan membuat catatan singkat selama penyelidikan. Proses analisis data melibatkan beberapa teknik. Beberapa teknik analisis data adalah sebagai berikut:

- Mengolah dan menyiapkan data untuk analisis
- Membaca semua data
- Analisis lebih rinci dengan mengkodekan data
- Menerapkan proses pengkodean untuk menggambarkan lingkungan, orang, kategori dan topik yang dianalisis
- Menunjukkan bagaimana deskripsi dan topik disajikan dalam sebuah laporan naratif atau kualitatif
- Menafsirkan atau menafsirkan data

Tujuan utama menganalisis data kualitatif adalah untuk menemukan makna data dengan mengidentifikasi data yang perlu dianalisis. Data yang diterima dari objek penelitian belum tersusun. Oleh karena itu, kita perlu menganalisis data yang berguna untuk menunjukkan keterkaitan dengan jelas dan menjadi data yang dapat dipahami. Berdasarkan fakta empiris, Peneliti langsung terjun ke lapangan, dan akan mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik

kesimpulan dari fenomena yang ada di lokasi perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya peneliti menangani data yang diperoleh dari lokasi lahan perkebunan ini akan menjadi hasil penelitian.

## **6. Proses Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui proses yang cukup panjang, mulai dari tahapan sebelum penelitian yaitu menyusun proposal. Tahapan kedua, penelitian lapangan yaitu saat penulis turun kelapangan untuk mencari data mengenai konflik yang terjadi di Nagari Kapa. Dan yang terakhir tahapan sesudah penelitian yaitu menyusun hasil yang didapatkan selama dilapangan.

Sebelum melakukan penelitian ke lapangan, penulis terlebih dahulu membuat proposal penelitian yang di mulai sejak semester 7, dengan mengajukan beberapa judul dan pada akhirnya menetapkan judul mengenai “konflik lahan” ini sebagai kajian yang akan penulis teliti. Kemudian penulis menyusun data-data mengenai konflik yang kemudian menjadi sebuah proposal. Penulis mulai melakukan bimbingan dengan pembimbing pada bulan Desember 2020. Dan juga penulis melakukan observasi ke lokasi penelitian. Banyak arahan yang didapat selama bimbingan guna menyusun proposal dalam bentuk yang lebih baik. Tepat pada tanggal 2 Maret 2021 proposal penelitian di ACC oleh dosen pembimbing, dan penulis pun melaksanakan seminar proposal pada tanggal 9 Maret 2021.

Setelah melaksanakan seminar proposal, penulis kemudian menyusun pertanyaan penelitian. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2021 penulis mengurus surat penelitian dan dua hari setelahnya dikeluarkan surat penelitian dari bagian akademik fakultas dengan nomor surat 479/UN16.08WD1/PG/2021. Pada akhir Maret 2021, penulis mulai mengurus surat izin penelitian ke Kesbangpol (kesatuan bangsa dan politik) Pasaman Barat. Setelah mendapatkan surat izin penelitian dari kesbangpol, penulis kemudian ke kantor wali nagari yang ada di Nagari Kapa tempat penulis melakukan penelitian. Disana penulis juga mendapatkan data mengenai konflik yang ada di sana. Selesai mengurus surat dari kantor wali nagari Kapa, penulis kemudian menuju perusahaan untuk meminta izin penelitian. Tetapi pihak perusahaan menolak untuk memberikan izin penelitian dengan alasan pertama, bahwa sekarang masih berada di masa pandemi Covid-19 dan alasan kedua, pihak perusahaan menutup diri karena masalah konflik ini merupakan masalah privasi yang dijaga ketat perusahaan. Pihak perusahaan juga menganjurkan penulis untuk merubah judul penelitian ataupun objek penelitian agar tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan data dilapangan.

Penulis melakukan penelitian sejak bulan April sampai dengan Juli. Banyak hambatan yang penulis temui selama dilapangan, mulai dari tidak mendapatkan izin dari pihak perusahaan, sulitnya mendapatkan informan untuk diwawancarai karena tidak semua masyarakat yang ada di Nagari Kapa terlibat

dalam konflik tersebut. Dan banyak dari masyarakat yang penulis temui tidak bersedia untuk dimintai informasi karena alasan takut salah menyampaikan dan lain sebagainya. Penelitian sempat tertunda beberapa waktu dikarenakan sulit menemukan informan. Penulis hanya mendapatkan 3 informan saja pada saat itu dengan data yang sangat sedikit.

Pada bulan Juli, penulis mulai turun kembali kelapangan dan mendapatkan keajaiban karena berhasil menemukan satu tokoh masyarakat yang ikut dalam perjuangan lahan perkebunan dari pihak niniak mamak dan masyarakat. Penulis pun mewawancarai informan yang berinisial AR selaku tokoh niniak mamak disana dan beliau memberikan informasi mengenai konflik lahan dan perjuangan dari masyarakat serta memberikan beberapa kontak informan yang dapat dimintai informasi. Penulis pun menghubungi kontak calon informan yang diberikan bapak AR tadi, tetapi hanya beberapa yang bersedia untuk dimintai informasi. Penulis pun memulai wawancara dengan informan yang juga ikut dalam konflik lahan ini. Informan yang penulis wawancarai seperti *datuak* dan *niniak mamak*, masyarakat/petani, mantan wali nagari dan yang lainnya.

Setelah melakukan penelitian di lapangan, penulis segera memindahkan informasi yang didapat selama dilapangan. Informasi-informasi dan data-data berupa dokumentasi, catatan dan rekaman segera penulis susun sehingga menjadi sebuah skripsi.

